Katalog : 9101009.18

ANALISIS ISU TERKINI

PROVINSI LAMPUNG

2022

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG

ANALISIS ISU TERKINI

PROVINSI LAMPUNG

2022

https://lampung.bps.go.id

Analisis Isu Terkini Provinsi Lampung 2022

ISSN: -
No. Publikasi: 18000.2234
Katalog: 9101009.18

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman: x + 39 halaman

Naskah:
BPS Provinsi Lampung

Penyunting:
BPS Provinsi Lampung

Desain Kover Oleh:
BPS Provinsi Lampung

Ilustrasi Kover:
Masa Pandemi Covid-19

Penerbit:
©BPS Provinsi Lampung

Pencetak: -

Sumber Ilustrasi: -

https://lampung.bps.go.id

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, engkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

ANALISIS ISU TERKINI PROVINSI LAMPUNG 2022

Pengarah
Endang Retno Sri Subiyandani

Penanggungjawab
Nurul Andriana

Editor
Nurul Andriana

Pengolah Data
Gun Gun Nugraha
Desliyani Tri Wandita

Kontributor
Gun Gun Nugraha
Desliyani Tri Wandita

https://lampung.bps.go.id

https://lampung.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Analisis Isu Terkini Provinsi Lampung 2022 merupakan salah satu publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Publikasi ini menyajikan pembahasan beberapa tema atau isu penting yang sedang berkembang. Pada edisi perdana ini, publikasi Analisis Isu Terkini hanya membahas dua tema. Tema pertama berkaitan dengan analisis hasil Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 (SPMPMPC) di Lampung dan yang kedua analisis hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dihubungkan dengan masa pandemi Covid-19 di Lampung.

Kita sadari bahwa pandemi Covid-19 memberikan efek yang sangat luar biasa pada berbagai bidang. Bukan saja pada bidang kesehatan, namun juga pada bidang ekonomi. Kedatangan pandemi Covid-19 yang tiba-tiba, membangunkan kita semua bahwa kita belum cukup siap menghadapi situasi seperti ini. Di tengah upaya pemerintah menekan dan mengontrol laju penularan Covid-19, BPS juga memotret bagaimana perilaku masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Di samping itu, BPS juga memotret bagaimana kondisi ketenagakerjaan di tengah ancaman pandemi Covid-19.

Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun. Saya menyadari publikasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dari para pengguna data dan pembaca. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

https://lampung.bps.go.id

Bandar Lampung, Oktober 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung

Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si., M.M.

https://lampung.bps.go.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar v
Daftar Isi vii
Daftar Tabel viii
Daftar Gambar ix

Tema I:
Kedisiplinan Masyarakat Lampung dalam Melawan Covid-19 Hasil Survei Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 1
1. Penanganan Covid-19 di Lampung 3
2. Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Garda Terdepan Penanganan Covid-19 7
3. Persepsi Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan 3T oleh Pemerintah 12
4. Mendorong Kesuksesan Program Vaksinasi Nasional di Lampung 15
5. Kesehatan Mental Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 19
6. Kesimpulan 23
7. Referensi 24

Tema II :
Karakteristik Penduduk Lampung yang Sementara Tidak Bekerja dan Menganggur Karena Covid-19 25
1. Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Lampung 29
2. Keterkaitan Karakteristik Pekerja dan Kondisi Sementara Tidak Bekerja Atau Menganggur Karena Covid-19 30
3. Kesimpulan 38
4. Referensi 39

https://lampung.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase Karakteristik Tenaga Kerja yang Sementara Tidak Bekerja karena COVID-19 di Provinsi Lampung ..	33
Tabel 2	Statistik Uji Model Regresi Logistik Tenaga Kerja yang Sementara Tidak Bekerja Akibat COVID-19 di Provinsi Lampung	34
Tabel 3	Persentase Karakteristik Pengangguran karena COVID-19 di Provinsi Lampung	36
Tabel 4	Statistik Uji Model Regresi Logistik Pengangguran Karena COVID-19 di Provinsi Lampung	38

https://lampung.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perkembangan Kasus terkonfirmasi Positif Covid-19 di Lampung	4
Gambar 2	Strategi Penanganan Pandemi Covid-19	5
Gambar 3	Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19	6
Gambar 4	Tingkat Kepatuhan Melaksanakan Protokol 3M Menurut Beberapa Karakteristik Respon Selama Seminggu Terakhir di Lampung	8
Gambar 5	Korelasi Kepatuhan Protokol Kesehatan dengan Perubahan Kasus Covid-19	11
Gambar 6	Responden yang Melaporkan Kepada Satgas atau Pengurus Lingkungan Setempat Ketika Terpapar Covid-19 Menurut Kabupaten/Kota di Lampung	13
Gambar 7	Responden yang Melaporkan Kepada Satgas atau Pengurus Lingkungan Setempat Ketika Terpapar Covid-19	13
Gambar 8	Pengetahuan Responden Tentang Keberadaan Posko Covid-19	14
Gambar 9	Tahapan Kelompok Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Lampung	16
Gambar 10	Situasi Terkini Program Vaksinasi Nasional di Lampung	17
Gambar 11	Alasan Responden Sudah Melakukan Vaksinasi	18
Gambar 12	Alasan Responden Belum Melakukan Vaksinasi	18
Gambar 13	Perasaan yang Dialami Saat Berdiam di Rumah di Lampung	20
Gambar 14	Perasaan yang Dialami Saat Berdiam di Rumah Akibat Pembatasan Aktivitas Menurut Jenis Kelamin di Lampung	21
Gambar 15	Perasaan yang Dialami Saat Berdiam di Rumah Akibat Pembatasan Aktivitas Menurut Status Pernikahan di Lampung	21
Gambar 16	Perasaan yang Dialami Saat Berdiam di Rumah Akibat Pembatasan Aktivitas Menurut Kelompok Umur di Lampung	22
Gambar 17	Kegiatan yang Dilakukan Selama Pembatasan Kegiatan di Lampung	23
Gambar 18	Jumlah Penduduk 15 Tahun atau Lebih yang Terdampak COVID-19 (Juta Orang), Agustus 2021	29
Gambar 19	Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih yang Terdampak COVID-19 Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2021	30

https://lampung.bps.go.id

https://lampung.bps.go.id

DISIPLIN MASYARAKAT LAMPUNG MELAWAN COVID-19 HASIL SURVEI PERILAKU MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

https://lampung.bps.go.id

1. PENANGANAN COVID-19 DI LAMPUNG

1.1 Lampung dan Pandemi Covid-19

Kemunculan Covid-19 pada akhir tahun 2019 telah menggegerkan seantero dunia. Daya tularnya yang cepat serta efek virus ini yang mematikan menghadrikan hipotesis bagi dunia bahwa pandemi Covid-19 diprediksi akan berlangsung lama dan masif. Berdasarkan *dashboard* resmi WHO, https://covid19.who.int, hingga 5 Oktober 2022, jumlah kasus terinfeksi mencapai 615,78 juta orang dengan tingkat kematian mencapai 6,53 juta jiwa yang tersebar hampir di seluruh negara. Virus ini tidak hanya mudah menular, namun juga memiliki kemampuan bermutasi yang sangat cepat. Akibatnya, gelombang kenaikan kasus positif Covid-19 terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Dengan demikian, dibutuhkan strategi penanganan yang tepat yaitu dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, kultur dan budaya masyarakat (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021).

Merespons status Darurat Kesehatan Global yang ditetapkan oleh WHO, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan untuk menangani masalah Covid-19 di Indonesia. Selain menetapkan keadaan darurat bencana pemerintah juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2020a). Awalnya, Gugus Tugas Covid-19 memfokuskan diri pada penanganan kesehatan dan karantina. Namun kemudian pemerintah menyadari bahwa penanganan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri melawan serangan virus korona. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal ini, pemerintah mengubah Gugus Tugas Covid-19 menjadi Satgas Penanganan Covid-19 yang bekerja di bawah struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (BNPB, 2020).

Tugas dan fungsi Satgas Covid-19 lebih luas hingga menyentuh disiplin protokol kesehatan, kerja sama antar lembaga, dukungan data dan IT, hingga hubungan denganpara relawan dan para ahli di bidangnya. Dengan demikian, penanganan Covid-19menjadi lebih kompleks dan menyeluruh. Unsur yang dilibatkan menjadi lebih banyak mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga media massa. Sebuah konsep yang dikenal sebagai kolaborasi pentaheliks. Dengan ini harapannya pelaksanaan penanganan Covid-19 di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

Provinsi Lampung sebagai bagian dari wilayah NKRI secara tegas dan disiplin tinggi turut melaksanakan instruksi dan arahan pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Termasuk di dalamnya pembentukan Satgas Covid-19 di Provinsi Lampung. Harapannya, sebaran Covid-19 di Lampung dapat dikendalikan dan terkontrol sehingga tidak semakin meluas di Provinsi Lampung secara khusus.

https://lampung.bps.go.id

1.2 Perkembangan Penyebaran Covid-19 di Lampung

Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang di Indonesia, sebagian diantaranya meninggal dunia. Hingga 5 Oktober 2022, jumlah yang terkonfirmasi positif virus korona di Indonesia sudah mencapai 6,44 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 158.156 kasus meninggal dunia. Tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia tercatat lebih tinggi dari tingkat kematian secara global. Berdasarkan rilis data WHO, jumlah penduduk dunia yang terpapar *SARS-CoV-2* lebih dari 250 juta orang dengan 5.062.106 orang atau 2,02 persen kasus diantaranya yang meninggal dunia (WHO, 2021). Di Lampung, pada kondisi 5 Oktober 2022, jumlah kasus terinfeksi mencapai 75.754 atau 1,2 persen dari angka nasional. Jumlah kasus sembuh mencapai 71.354 atau 94,2 persen dan kasus meninggal mencapai 4.196 atau 5,5 persen.

Sama halnya dengan nasional. Lampung telah melalui dua gelombang besar kenaikan kasus harian Covid-19. Gelombang pertama terjadi di awal tahun 2021. Pemicunya adalah liburan akhir tahun dan menurunnya kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Menjelang liburan Ramadhan 2021, pemerintah memberlakukan berbagai pembatasan kegiatan masyarakat, sebagai upaya untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. Namun kemunculan varian delta menandai kenaikan kasus Covid-19 gelombang kedua.

Cepatnya virus korona bermutasi menjadi varian baru menyebabkan penyebaran Covid-19 sangat sulit untuk diprediksi. Mutasi virus lebih cepat terjadi jika tingkat penyebarannya di masyarakat juga tinggi. Artinya, jika masyarakat terus disiplin melaksanakan protokol kesehatan maka tingkat penyebaran dan mutasi Covid-19 dapat ditekan. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan tingkat kepositifan (*positivity rate*) Covid-19 di Lampung. Pada gambar dapat dilihat bahwa pada periode gelombang pertama dan kedua, *positivity rate* juga ikut meningkat tajam. Tingkat *positivity rate* yang tinggi pada awal pandemi dapat diabaikan mengingat jumlah tes yang masih rendah pada saat itu. Dari sini, dapat dipahami pula bahwa jumlah tes yang dilakukan setiap harinya juga sangat penting. Jika jumlah tes rendah maka dikhawatirkan banyak kasus Covid-19 yang *unreported* atau tidak terdeteksi.

Gambar 1.
Perkembangan Kasus terkonfirmasi Positif Covid-19 di Lampung

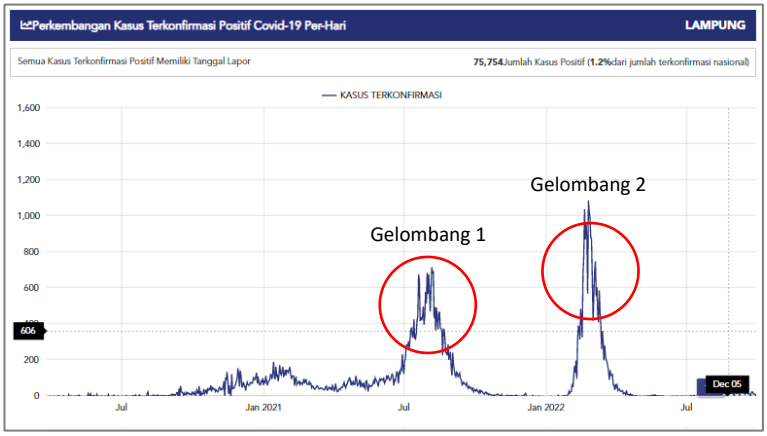

1.3 Strategi Penanganan Covid-19 di Lampung

Lampung merupakan provinsi dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi ke-5 di Sumatra. Setelah sempat kewalahan mengalami gelombang kedua, kini jumlah kasus harian sudah turun. Untuk menjaga kondisi yang baik ini, pemerintah daerah dan pusat berupaya untuk mengendalikan kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebarkan Covid-19 melalui kebijakan PPKM multi-level, posko desa/kelurahan, serta meluaskan cakupan program vaksinasi nasional. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan disiplin protokol kesehatan 3M serta menjaga kualitas pelaksanaan 3T di lapangan (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021b).

Gambar 2.
Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

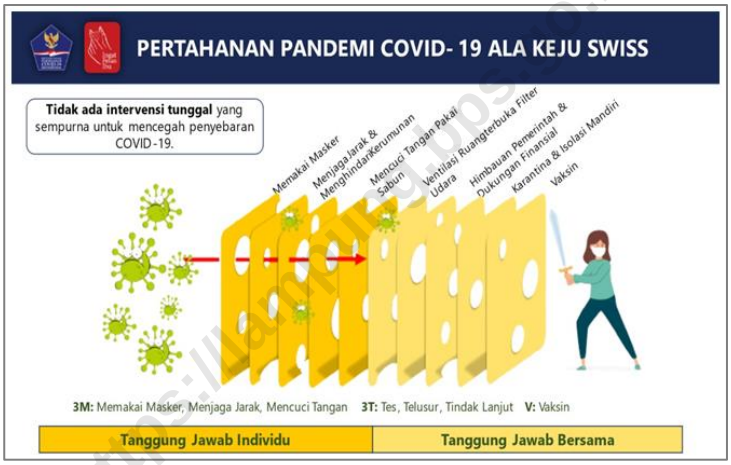

Dalam menyusun strategi penanganan Covid-19 diperlukan upaya-upaya yang tidak berdiri sendiri. Semua upaya dilakukan melalui kolaborasi *pentaheliks*. Penanganan dari aspek kesehatan saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah pandemi Covid-19. Sistem kesehatan akan kolaps karena tidak mampu menanggung beban kebutuhan pasien Covid-19. Upaya yang dapat dilakukan adalah serangkaian intervensi ala keju Swiss (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021). Jika dengan suatu intervensi masih belum cukup untuk menghentikan penyebaran Covid-19, maka intervensi lainnya diharapkan dapat menutup atau mencegah kemungkinan terjadinya hal tersebut. Program vaksinasi nasional hadir sebagai *game changer* situasi pandemi dengan tujuan mewujudkan kekebalan komunitas (*herd immunity*) secara nasional. Hal ini dapat terjadi apabila cakupan vaksinasi telah mencapai setidaknya 70 persen populasi penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 270 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021; Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021a).

1.4 Survei Perilaku Masyarakat sebagai Jendela Informasi Dampak Pandemi

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penangananpandemi Covid-19, BPS melaksanakan Survei Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (SPMPMPC-19) pada 13–20 Juli 2021. Survei ini bertujuan untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 melalui penyediaan informasi tentang kepatuhan diri dan masyarakat sekitarterhadap protokol kesehatan, pendapat masyarakat tentang vaksinasi, dan respons masyarakat dalam menyikapi masa pembatasan kegiatan.

Beberapa aspek yang digali dalam survei ini antara lain gambaran perilaku responden dalam menerapkan protokol kesehatan, penilaian responden di lingkungan sekitarnya dalam penerapan protokol kesehatan, penilaian responden terhadap implementasi PPKM Darurat pada beberapa aspek sosial ekonomi, partisipasi responden dalam vaksinasi, pelaporan tingkat paparan Covid-19, respons dalam menyikapi pembatasan kegiatan, dan penilaian responden terhadap aksesibilitas terhadap kebutuhan pada masa pembatasan kegiatan.

Gambar 3.
Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19

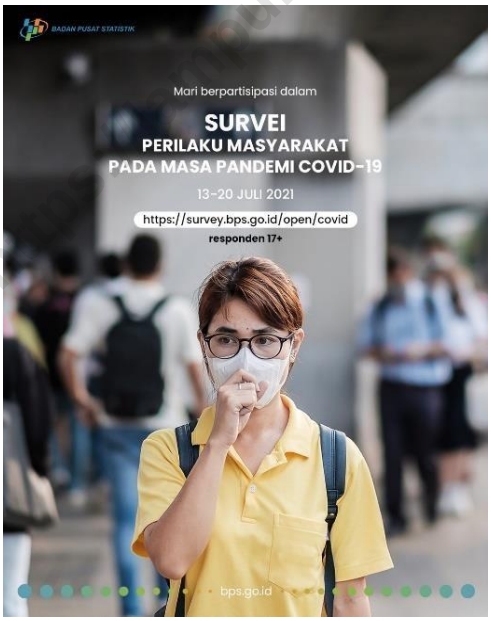

Pada bab ini akan dibahas bagaimana kondisi kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan 3M, mendukung pelaksanaan program 3T, dan vaksinasi nasional berdasarkan hasil survei tersebut. Pada bab ini juga membahas kondisi kesehatan mental masyarakat pada masa pandemi. Kedua pembahasan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi penanganan pandemi Covid-19 sebagai jendela informasi yang berguna bagi masyarakat.

2. DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI GARDA TERDEPAN PENANGANAN COVID-19

2.1 Pentingnya Protokol Kesehatan 3M

Intisari dari strategi pencegahan penyebaran Covid-19 adalah mematuhi protokol kesehatan 3M, mendukung pelaksanaan 3T, dan mengikuti program vaksinasi nasional. Protokol kesehatan 3M terdiri dari tiga langkah sederhana untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19 antara lain memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak minimal 2 meter serta menjauhi kerumunan. Ketiga protokol ini tidak dapat dilaksanakan secara parsial. Semua harus dilakukan secara disiplin dan berkesinambungan.

Masker yang menutupi sebagian area wajah mulai dari bagian atas hidung hingga bawah dagu dapat melindungi kita dari kemungkinan terpapar virus. Masker mencegah masuknya *droplet* dari orang lain ketika batuk/bersin/berbicara. Demikian pula sebaliknya, menggunakan masker juga berarti melindungi orang lain dari *droplet* yang keluar saat kita batuk/bersin/berbicara. Sementara itu, tangan berperan penting dalam transmisi mikroorganisme jika kita tidak menjaga kebersihan tangan dengan baik. Mencuci tangan merupakan salah satu langkah paling efektif untuk menghindarkan kita dari sakit dan menyebarkan bakteri ke orang lain. WHO telah menetapkan sering mencuci tangan dengan sabun dan air sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran virus. Terakhir, menjaga jarak secara fisik dari orang lain juga dapat meminimalkan risiko penularan Covid-19. *Droplet* yang keluar dari mulut ketika berbicara atau batuk dapat terlontar hingga radius kurang lebih 1–2 meter. Sehingga, jika kita mampu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan maka risiko penularan Covid-10 dapat dijaga tetap rendah.

Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi badan kesehatan dunia, melaksanakan 3M secara komplit mampu menekan risiko penularan Covid-19. Meskipun tidak sepenuhnya menjamin seseorang terbebas dari penyakit ini, setidaknya tingkat penularan dapat ditekan serendah mungkin. Hal ini harus diperkuat dengan partisipasi masyarakat pada program vaksinasi nasional. Jika, cakupan vaksinasi nasional mampu mencapai lebih dari 80 persen total populasi maka tujuan untuk mencapai kekebalan komunitas dapat lebih cepat tercapai.

2.2 Kepatuhan Masyarakat Melaksanakan Protokol Kesahatan 3M

Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 (SPMPMPC-19) berusaha menangkap tingkat kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Gambar 4 di bawah ini menyajikan tingkat kepatuhan responden terhadap protokol kesehatan 3M menurut beberapa karakteristik atau kategori responden.

Gambar 4.
Tingkat Kepatuhan Melaksanakan Protokol 3M Menurut Beberapa Karakteristik Respon Selama Seminggu Terakhir di Lampung

Memakai Masker

Tingkat Kepatuhan	
SMA ke Bawah **80,0%**	Perguruan Tinggi **80,3%**
Laki-laki **75,9%**	Perempuan **86,2%**
Menikah **78,9%**	Belum/Tidak Menikah **83,3%**
Pernah **80,6%**	Tidak Pernah **78,5%**
Belum Vaksinasi **71,2%**	Sudah Vaksin 1 **77,9%**

Mencuci Tangan

Tingkat Kepatuhan	
SMA ke Bawah **71,1%**	Perguruan Tinggi **73,0%**
Laki-laki **68,4%**	Perempuan **77,3%**
Menikah **72,7%**	Belum/Tidak Menikah **70,6%**
Pernah **72,8%**	Tidak Pernah **69,2%**
Belum Vaksinasi **64,8%**	Sudah Vaksin 1 **69,0%**

Menjaga Jarak

Tingkat Kepatuhan	
SMA ke Bawah **65,7%**	Perguruan Tinggi **67,2%**
Laki-laki **63,0%**	Perempuan **71,4%**
Menikah **67,0%**	Belum/Tidak Menikah **62,5%**
Pernah **67,0%**	Tidak Pernah **64,5%**
Belum Vaksinasi **58,4%**	Sudah Vaksin 1 **64,1%**

Menjauhi Kerumunan

Tingkat Kepatuhan	
SMA ke Bawah **68,2%**	Perguruan Tinggi **71,0%**
Laki-laki **66,3%**	Perempuan **74,5%**
Menikah **69,8%**	Belum/Tidak Menikah **69,3%**
Pernah **70,4%**	Tidak Pernah **66,8%**
Belum Vaksinasi **63,2%**	Sudah Vaksin 1 **66,5%**

https://lampung.bps.go.id

Beberapa literatur menyebutkan bahwa tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan (Pradono & Sulistyowati, 2014; Pratiwi, 2021; Wiranti, dkk., 2020). Temuan sejumlah literatur ini memperkuat temuan survei yang menyatakan bahwa responden dengan pendidikan Perguruan Tinggi cenderung lebih patuh dari responden dengan pendidikan SMA ke bawah. Dapat dilihat pada Gambar 4, responden yang memiliki pendidikan lebih tinggi tercatat lebih patuh jika dibandingkan dengan responden dengan pendidikan lebih rendah, dalam melaksanakan seluruh protokol kesehatan. Pendidikan yang tinggi cenderung membuat seseorang lebih kritis dan bijak dalam memahami sesuatu. Dalam hal ini adalah memahami manfaat menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi membuat masyarakat lebih mampu memilah informasi yang beredar dan membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat.

Selain pendidikan, literatur lain juga menyebutkan bahwa kaum perempuan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini disebabkan karena perbedaan sifat pada setiap gender. Perempuan terutama kaum ibu memiliki sifat yang lembut, penuh kasih sayang, serta merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang di sekitarnya. Sedangkan laki- laki cenderung agresif, gemar berpetualang, relatif kasar, tidak suka terkekang dan lebih berani mengambil risiko. Dalam konteks pandemi, risiko dapat berarti tertular Covid-19. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan perempuan cenderung lebih takut untuk melanggar aturan, termasuk diantaranya aturan protokol kesehatan. Pernyataan ini dibuktikan secara langsung melalui hasil Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19, di mana tingkat kepatuhan kaum perempuan baik dalam menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ataupun menjauhi kerumunan selalu lebih tinggi dari kaum lelaki. Hal ini pula yang mendasari pendekatan Satgas Penanganan Covid-19 melalui Bidang Perubahan Perilaku dalam berkampanye disiplin protokol kesehatan 3M menggunakan tagar "*#IngatPesanIbu*". Harapannya, masyarakat memahami pesan protokol kesehatan sebagai pesan seorang ibu kepada anaknya sehingga dapat diterima dan dilaksanakan dengan disiplin.

Temuan lain dari survei ini adalah berkaitan dengan responden yang belum pernah bersentuhan dengan isu Covid-19, misalnya belum pernah melakukan tes Covid-19 dan/atau belum pernah tertular penyakit ini. Berdasarkan hasil survei, responden dengan kategori seperti ini memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah dari mereka yang pernah melakukan tes atau mereka yang pernah positif Covid-19. Bagi mereka yang pernah terkonfirmasi positif atau pernah "dekat" dengan kasus Covid-19, lebih memahami kondisi dan juga risiko yang ditimbulkan penyakit ini, sehingga kepedulian mereka terhadap protokol kesehatan lebih baik. Gambar 5 menunjukkan bagaimana tingkat kepatuhan protokol kesehatan responden penyintas Covid-19 lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum pernah terjangkit penyakit ini. Demikian pula dengan kepatuhan responden yang pernah melakukan tes Covid-19 yang lebih tinggi dari responden yang belum pernah melakukan tes.

Gambaran yang kurang lebih sama untuk kepatuhan responden yang sudah mengikuti vaksinasi dibandingkan dengan yang belum mengikuti vaksinasi. Responden yang belum mengikuti vaksinasi nasional justru memiliki tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang sudah mengikuti vaksinasi. Padahal, dengan belum adanya zat vaksin di dalam tubuhnya, potensi mereka untuk tertular COVID-19 lebih tinggi ketimbang yang sudah mengikuti vaksinasi nasional. Faktor kepercayaan terhadap informasi tentang COVID-19 mungkin saja memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan juga vaksinasi nasional. Dengan demikian, pemerintah perlu lebih efektif mengomunikasikan manfaat protokol kesehatan dan vaksinasi dengan menyentuh kelompok masyarakat yang memiliki kepercayaan rendah dan meyakinkan mereka bahwa tanpa protokol kesehatan dan vaksinasi mereka akan lebih rentan terpapar.

Edukasi dan sosialisasi akan bahaya penyakit ini dan bagaimana menghindarinya perlu untuk terus dilakukan. Supaya tingkat pengetahuan masyarakat akan pandemi Covid-19 terus meningkat. Harapannya, dengan semakin tinggi pengetahuan seseorang akan Covid-19 maka kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan akan meningkat pula. Jika ini menjadi fenomena global, maka mewujudkan kekebalan komunitas akan menjadi lebih mudah.

Sementara itu, berdasarkan hasil perbandingan survei ini dengan hasil survei sejenis yang sebelumnya (Bulan April dan September 2020), kepatuhan untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan selalu memiliki skor yang paling rendah di antara protokol kesehatan lainnya. Terkait dengan hal ini, seorang Profesor Ilmu Komunikasi dari Universitas Furman (USA), John A. McArthur, Ph.D., menjelaskan mengapa protokol menjaga jarak dan menjauhi kerumunan sulit untuk dilakukan melalui sebuah cabang ilmu yang disebut sebagai proksemik. Proksemik adalah ilmu yang mempelajari jarak fisik yang digunakan oleh manusia dalam interaksi sosialnya sehari-hari. Garis besarnya ialah, seseorang cenderung menciptakan lingkaran jarak sosial dengan orang lain di mana semakin dekat jarak antara mereka maka semakin erat pula faktor rasa hormat, kasih sayang, atau pun kedekatan personal didalamnya. Sebaliknya, semakin jauh jarak yang digunakan maka menunjukkan semakin rendah atau semakin renggang faktor perasaan di atas di antara mereka. Sebagai contoh, seseorang cenderung untuk menjauhi orang lain yang dirasa membawa rasa tidak nyaman bagi mereka (McArthur, 2020).

Dalam konteks pandemi, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan diperlukan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 melalui *droplet* yang mungkin keluar ketika kita berbicara, batuk, atau bersin. Namun, secara kultur budaya dan juga norma atau kaidah dalam berkomunikasi yang kita pelajari sepanjang hidup kita, menjaga jarak memiliki konotasi yang tidak baik. Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, manusia menggunakan jarak sebagai simbol kedekatan personal. Namun kini di masa pandemi, keharusan membalik 180 derajat sikap kita tentu menjadi sebuah kesulitan. Kebiasaan kelompok masyarakat dalam berkumpul bahkan menjadi salah satu dasar negara kita yaitu musyawarah mufakat. Dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi kebiasaan umum di tengah masyarakat untuk berkumpul membahas masalah sosial yang terjadi. Hal ini bisa terjadi di mana saja, tidak selalu dalam sebuah forum resmi masyarakat. Sehingga, masyarakat perlu memahami bahwa kini di tengah pandemi jarak yang diciptakan dalam protokol kesehatan adalah wujud kepedulian, rasa hormat, saya kasih sayang terhadap sesama bukan justru sebaliknya.

2.3 Kepatuhan Protokol Kesehatan dan Kasus Harian Covid-19

Protokol kesehatan merupakan salah satu strategi intervensi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Tujuannya untuk menyiapkan perilaku masyarakat agar waspada terhadap penyebaran virus SARS-CoV-2 melalui tiga langkah sederhana: memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga

jarak menjauhi kerumunan. Perilaku disiplin protokol kesehatan akan meminimalkan risiko seseorang terpapar COVID-19.

Hipotesis ini dibuktikan sebagaimana dijelaskan dalam publikasi Analisis Isu Terkini 2021 BPS RI. Dengan menggunakan teknik analisis korelasi, tingkat kepatuhan memengaruhi secara signifikan terhadap penambahan kasus harian Covid-19. Data yang digunakan dalam analisis tersebut adalah data kepatuhan protokol kesehatan 3M menurut provinsi hasil survei perilaku dan kasus harian terkonfirmasi positif Covid-19 menurut provinsi dari rilis Satgas Penanganan Covid-19. Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 memiliki dua indikator kepatuhan yaitu tingkat kepatuhan diri sendiri dan persepsi kepatuhan orang lain. Tingkat kepatuhan dan persepsi kepatuhan menggunakan rata-rata dari empat protokol kesehatan yang ada dalam survei. Sementara untuk kasus harian Covid-19 yang digunakan adalah rata-rata perubahan kasus terkonfirmasi harian Covid-19 menurut provinsi dari tanggal 20-28 Juli 2021.

Gambar 5.
Korelasi Kepatuhan Protokol Kesehatan dengan Perubahan Kasus Covid-19

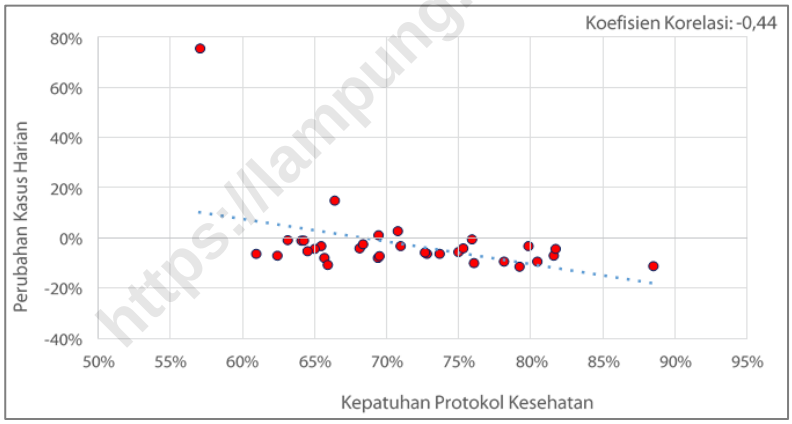

https://lampung.bps.go.id

Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa, semakin tinggi tingkat kepatuhan protokol kesehatan suatu daerah maka akan semakin rendah perubahan kasus harian. Mengingat periode data yang digunakan adalah pada saat gelombang kedua kenaikan kasus Covid-19, maka perubahan kasus harian yang semakin rendah diartikan sebagai penurunan kecepatan kenaikan kasus atau bahkan penurunan kasus Covid-19. Koefisien korelasi yang dihasilkan adalah -0,44 yang berarti memang terdapat hubungan yang berkebalikan antara kepatuhan protokol kesehatan dengan perubahan kasus harian Covid-19. Analisis korelasi sederhana ini membuktikan bahwa protokol kesehatan yang semakin baik akan menekan penambahan kasus harian Covid-19. Maka tidak berlebihan jika pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 terus menerus mengampanyekan penggunaan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jaran dan menjauhi kerumunan di tengah masyarakat.

Berdasarkan beberapa temuan terkait kepatuhan protokol kesehatan 3M, perlu dimengerti bahwa peran masyarakat untuk terus patuh protokol kesehatan dan tugas pemerintah untuk terus mengkampanyekan langkah-langkah sederhana ini adalah sebuah kewajiban bersama. Harapannya, disiplin masyarakat yang terus menerus dibarengi dengan peran sentral pemerintah dalam menjaga kepatuhan ini melalui berbagai sumber daya yang ada.

3. PERSEPSI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN 3T OLEH PEMERINTAH

3.1 Urgensi Pelaksanaan Tes, Telusur, dan Tindak Lanjut (3T)

Strategi berikutnya setelah pelaksanaan protokol Kesehatan 3M adalah Tes, Telusur, dan Tindak Lanjut atau dikenal dengan 3T. Jika pelaksanaan 3M merupakan tanggung jawab masyarakat, maka pelaksanaan 3T menjadi tugas pemerintah. Hal ini terkait dengan amanah UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Namun strategi intervensi ini tidak akan sukses berjalan tanpa dukungan masyarakat. Untuk itu, sangat penting melihat bagaimana masyarakat mendukung pelaksanaan 3T dalam penanganan Covid-19.

Protokol 3T dirancang untuk mengidentifikasi penyebaran kasus Covid-19 di tengah masyarakat. Langkah pertama yaitu dengan pengecekan kondisi kesehatan melalui beberapa jenis tes untuk mendeteksi Covid-19. Kedua, menelusuri orang- orang yang terindikasi berkontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif atau terduga CovidVID-19. Langkah terakhir, menentukan tindak lanjut dari hasil tes dan telusur dengan melakukan tindakan isolasi dan perawatan di layanan kesehatan atau secara mandiri. Serangkaian langkah ini dilakukan untuk memastikan penyebaran Covid-19 dapat ditelusuri dan dicegah penyebarannya (Rajan, dkk., 2020).

Tes Covid-19 adalah pengecekan kesehatan melalui beberapa jenis tes untuk mendeteksi apakah seseorang positif Covid-19 atau tidak. Tes penting untuk dilakukan agar seseorang bisa mendapatkan perawatan dengan cepat dan menghindari potensi penularan virus Covid-19 ke orang lain. Penerapan 3T dalam pemutusan rantai penyebaran virus Covid-19 dilakukan dengan melakukan telusur atau *contact tracing*. Penelusuran kontak merupakan proses untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola orang-orang yang berkontak erat dengan kasus konfirmasi/terduga untuk mencegah penularan selanjutnya. Upaya ini penting karena kasus konfirmasi dapat menularkan penyakit sejak 2 hari sebelum hingga 14 hari sesudah timbulnya gejala (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2020b). Tindak Lanjut bertujuan sebagai perawatan kepada pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Perawatan ini dapat dilakukan masyarakat, salah satunya dalam bentuk isolasi yang bertujuan untuk memperkecil risiko penyebaran penyakit.

https://lampungprov.go.id

3.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Tes, Telusur, dan Tindak Lanjut (3T)

Untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan 3T, Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 menggali informasi terkait perilaku responden ketika terpapar Covid-19 dan pengetahuan yang dimiliki tentang keberadaan Posko Covid-19 di lingkungannya. Keberadaan Posko Covid-19 adalah salah satu strategi lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan pelaksanaan 3T di tengah masyarakat berjalan baik. Dari survei perilaku, responden yang pernah terpapar Covid-19 ditanya apakah melaporkan kepada petugas setempat atau posko Covid-19 terdekat. Dari sebagian yang menjawab tidak melaporkan kemudian ditanya lebih lanjut apakah memiliki pengetahuan tentang keberadaan Posko Covid-19 untuk mengetahui sejauh mana keberadaan dan kinerja Posko Covid-19 di tengah masyarakat.

Gambar 6.
Responden yang Melaporkan Kepada Satgas atau Pengurus Lingkungan Setempat Ketika Terpapar Covid-19 Menurut Kabupaten/Kota

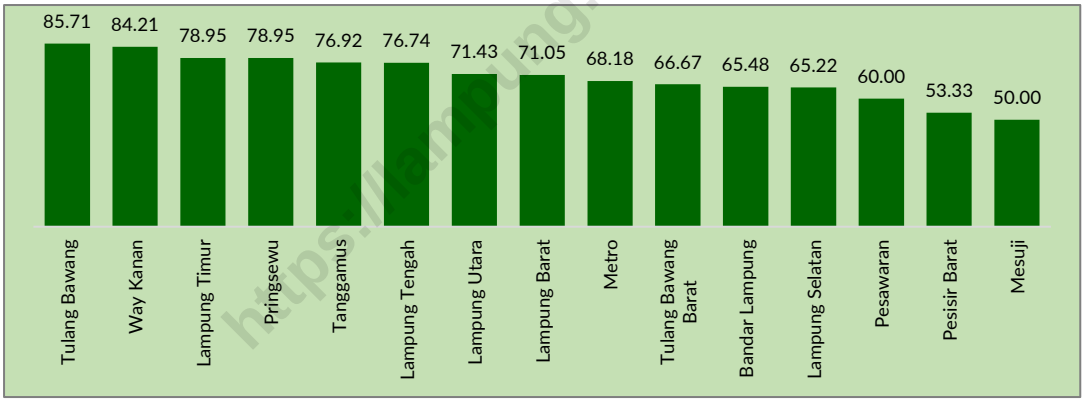

Gambar 7.
Responden yang Melaporkan Kepada Satgas atau Pengurus Lingkungan Setempat Ketika Terpapar Covid-19

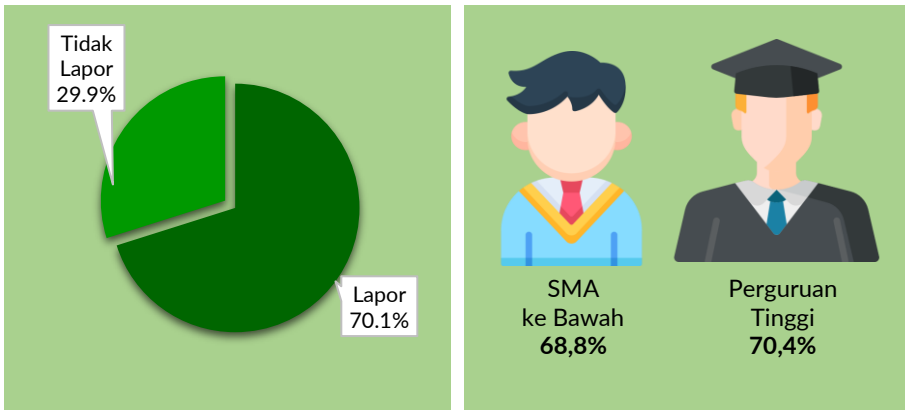

Gambar 6 di atas menunjukkan kesadaran responden untuk melakukan pelaporan ketika terpapar Covid-19 terbilang masih belum optimal. Secara total (Provinsi Lampung) persentase responden yang pernah terpapar Covid-19 dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang ada sebesar 70,1 persen (Gambar 7). Artinya, dari 100 orang yang tertular penyakit ini, 30 orang diantaranya tidak melaporkan atau terindikasi tidak terpantau oleh pemerintah. Hal ini dapat berakibat fatal karena tidak diketahui apakah mereka mendapatkan perawatan yang memadai atau tidak. Selain itu potensi terjadinya penularan di masyarakat menjadi lebih tinggi akibat proses telusur yang terhambat.

Dari 15 kabupaten/kota, Kabupaten Tulang Bawang memiliki tingkat kesadaran lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Mesuji memiliki tingkat kesadaran yang paling rendah untuk melaporkan diri ketika terpapar Covid-19. Responden dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi memiliki tingkat kesadaran lebih baik dibandingkan responden dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah.

Pemerintah terus berupaya menggencarkan 3T melalui penguatan peran Posko Covid-19. Dalam strategi penanganan Covid-19, pemerintah menginstruksikan dibentuknya Posko Desa/Kelurahan. Namun, hasil survei memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Lampung akan Posko Covid-19 masih rendah. Gambar 8 berikut memperlihatkan bagaimana penetrasi peran dan juga intervensi 3T melalui penguatan Posko Covid-19 masih belum merata.

https://lampung.bps.go.id

Gambar 8.
Pengetahuan Responden Tentang Keberadaan Posko Covid-19

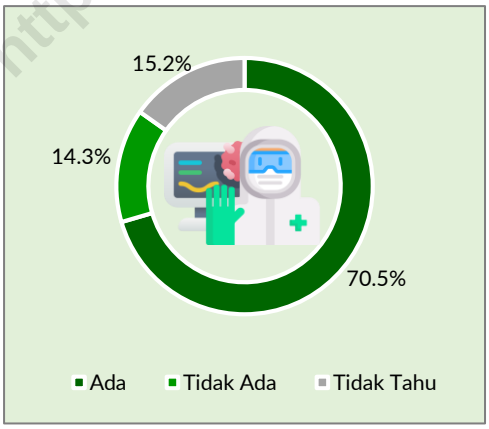

Di Lampung, 70,5 persen responden menyatakan bahwa Posko Covid-19 ada di wilayah tempat tinggalnya. Sementara 14,3 persen diantaranya menjawab tidak ada posko, sedangkan sisanya sebanyak 15,2 persen lebih mengaku tidak tahu. Artinya, setidaknya 29,5 persen responden berpotensi tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan Posko Covid-19.

4. MENDORONG KESUKSESAN PROGRAM VAKSINASI NASIONAL DI LAMPUNG

4.1 Vaksinasi Nasional sebagai *Game Changer*

Sejak lahir, manusia sudah "dihinggapi" berbagai macam virus, bakteri, dan mikroba. Sebagian besar tidak berbahaya, sebagian lain bermanfaat, dan beberapa diantaranya berbahaya karena menyebabkan penyakit. Sistem kekebalan tubuh menjaga kita dari serangan berbagai infeksi penyakit. Vaksin mengaktifkan sistem kekebalan tubuh kita tanpa membuat kita sakit. Banyak penyakit menular berbahaya bisa dicegah penularannya melalui langkah sederhana dan efektif ini. Program vaksinasi nasional yang dicanangkan pemerintah merupakan bagian penting untuk mengatasi pandemi. Dengan memberikan vaksin ke seluruh penduduk berarti memberikan kekebalan secara tidak langsung kepada masyarakat terhadap Covid-19.

Vaksin adalah produk biologi yang berisi zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Sejauh ini diketahui ada empat jenis vaksin dari cara pembuatannya yaitu vaksin dari virus yang dimatikan, vaksin dari virus yang dilemahkan, vaksin toksoid, dan vaksin biosintesis. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, menetapkan ada 7 vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia secara legal. Ketujuh vaksin tersebut adalah vaksin Merah Putih, Astra-Zeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer, dan Sinovac.

Vaksinasi sendiri merupakan pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar oleh penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah maka akan terbentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*). Kekebalan kelompok inilah yang menyebabkan proteksi silang, yaitu risiko seseorang yang tidak divaksinasi untuk tertular penyakit dari orang sekitarnya menjadi kecil dan tetap sehat karena masyarakat di lingkungan sekitarnya sudah mendapatkan vaksin. Maka, vaksinasi dengan cakupan yang tinggi dan merata sangatlah penting (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2020b).

4.2 Target dan Capaian Terkini Program Vaksinasi Nasional di Lampung

Program Vaksinasi Nasional Covid-19 di Lampung telah dimulai pada pertengahan Januari 2021. Target awal penerima vaksin gelombang pertama ada sebanyak 7,56 juta orang. Mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan, dan profil keamanan vaksin, pemerintah pada awalnya menetapkan empat tahapan prioritas penerima vaksin. Untuk tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan pada gelombang pertama di Januari hingga April 2021, sedangkan tahap 3 dan tahap 4 dilaksanakan pada gelombang kedua di April

2021 hingga Maret 2022. Pada program ini, pemerintah membiayai seluruh proses vaksinasi melalui APBN. Namun seiring situasi dan kondisi yang mendesak pada gelombang kedua kenaikan kasus positif Covid-19, pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi nasional.

Gambar 9.
Tahapan Kelompok Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Lampung

Target SDM KESEHATAN	Target PETUGAS PUBLIK	Target LANSIA	Target MASYARAKAT UMUM DAN RENTAN	Target USIA 12-17 TAHUN
35.601	409.854	704.246	4.615.322	880.203

Sumber : https://vaksin.kemkes.go.id/#/provinces

Selain itu, setelah sebelumnya masih menunda pemberian vaksin kepada lansia, pemerintah secara resmi mengizinkan pemberian vaksin Covid-19 bagi kelompok usia 60 tahun ke atas, komorbid, penyintas Covid-19 dan ibu menyusui dengan terlebih dahulu dilakukan anamnesa tambahan. Ini merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor: HK.02.02/I/368/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pada Kelompok Sasaran Lansia Komorbid dan Penyintas Covid-19 serta Sasaran Tunda yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit per tanggal 11 Februari 2021. Setelah mengeluarkan keputusan ini pemerintah juga membuka pelaksanaan vaksinasi untuk anak secara bertahap. Harapannya dengan semakin luas cakupan program vaksinasi nasional maka capaian manfaat vaksin dapat lebih luas demi terwujudnya tujuan kekebalan imunitas.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menargetkan setiap negara untuk memvaksinasi setidaknya 10 persen dari populasinya pada akhir bulan september 2021. Sekurangnya 40 persen pada akhir tahun 2021 ini dan 70 persen populasi dunia pada pertengahan 2022. Hingga pertengahan November 2021, dari total target sasaran vaksinasi Covid-19 sebanyak 208,2 juta orang, sekitar 132 juta diantaranya telah menerima vaksin dosis pertama dan lebih dari 86 juta sudah mendapatkan vaksin kedua. Sementara vaksinasi ketiga sebagai booster bagi tenaga kesehatan sudah diberikan sebanyak 1,19 juta (81 persen). Dengan demikian Indonesia telah melampaui target WHO yakni mampu memberikan vaksinasi lengkap setidaknya 40 persen populasi pada akhir tahun 2021. Per 17 November 2021, sekurangnya 86 juta orang atau 41,5 persen populasi masyarakat Indonesia telah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis kedua.

Sasaran vaksinasi nasional di Lampung adalah sebanyak 7.558.816. Dari target tersebut, capaian vaksin dosis 1 di Lampung mencapai 6.165.097 atau 81,56 persen. Capaian vaksin dosis 2 mencapai 4.904.341 atau 64,88 persen. Capaian vaksin dosis 3 mencapai 1.458.755 atau 19,30% (Gambar 10).

Gambar 10.
Situasi Terkini Program Vaksinasi Nasional di Lampung

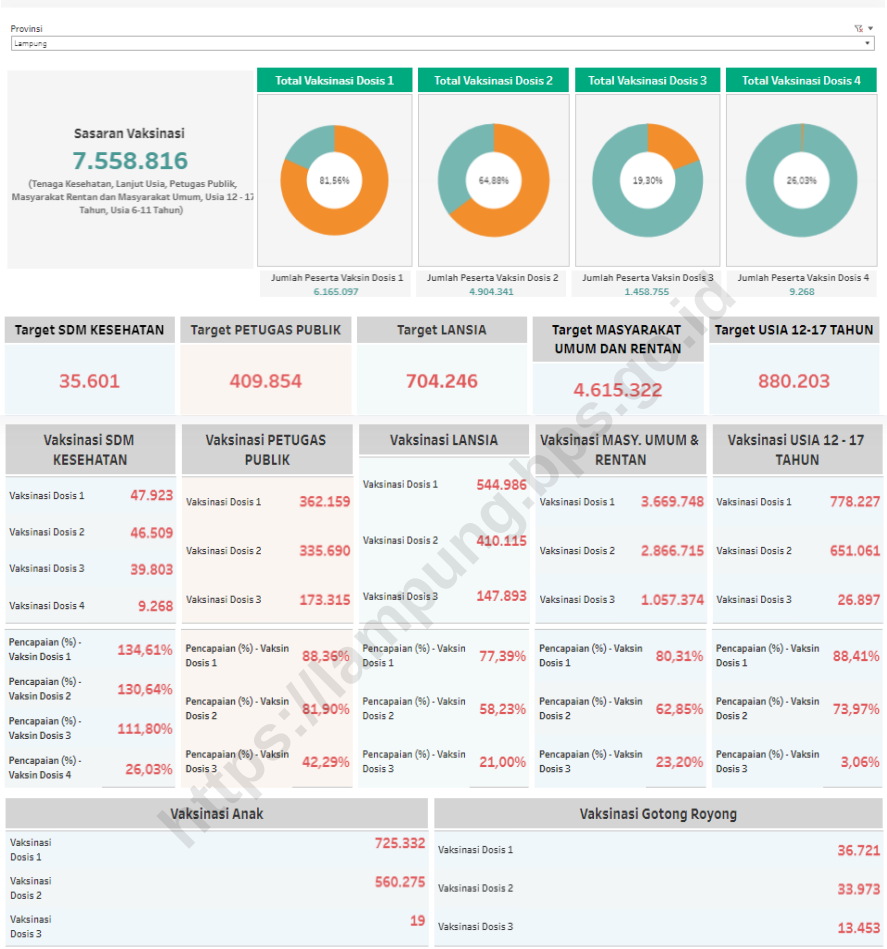

Sumber : https://vaksin.kemkes.go.id/#/provinces

4.3 Persepsi Masyarakat Lampung Terhadap Dukungan Program Vaksinasi Nasional

Capaian dan cakupan program vaksinasi di Lampung sejauh ini sudah sesuai dengan target pemerintah. Namun, sejumlah tantangan masih ada dan menjadi tugas bersama untuk dituntaskan. Baiknya capaian vaksinasi nasional di Lampung ini tak lepas dari tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin Covid-19. Hal ini tentu saja diawali dari upaya pemerintah dalam mengkampanyekan program vaksinasi nasional serta urgensinya terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dan Lampung khususnya. Gambar 11 berikut memperlihatkan bahwa faktor utama responden survei perilaku mengikuti program vaksinasi nasional di Lampung adalah dikarenakan

kesadaran diri sendiri bahwa vaksin itu penting dan bermanfaat untuk mencegah tertular Covid-19. Meski demikian, jumlah responden yang mengaku mengikuti karena diwajibkan atau mengikuti perintah baik dari atasan maupun pemerintah setempat masih mencapai 11,1 persen. Kelompok responden seperti ini tidak diketahui apakah betul-betul menyadari pentingnya vaksin Covid-19, tapi setidaknya tetap mau mengikuti program tersebut dan membantu penanganan pandemi.

Gambar 11.
Alasan Responden Sudah Melakukan Vaksinasi

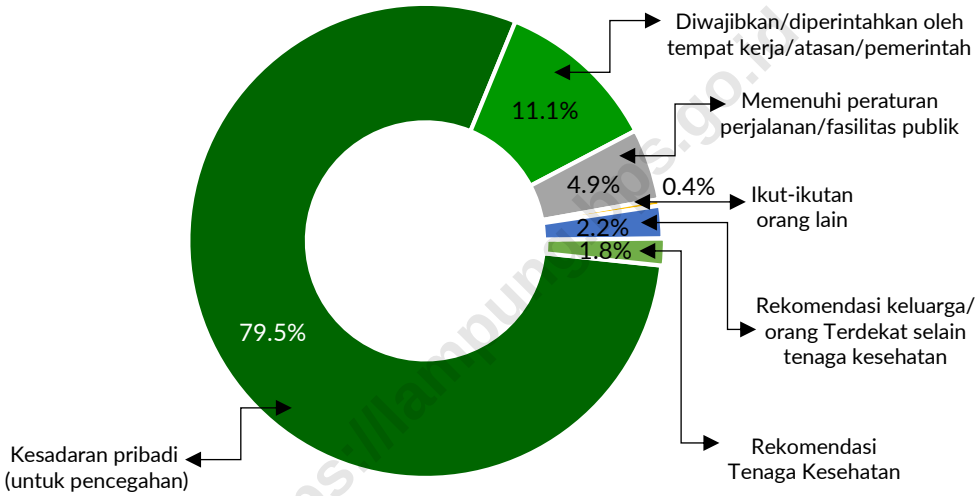

https://lampungprov.go.id

Gambar 12.
Alasan Responden Belum Melakukan Vaksinasi

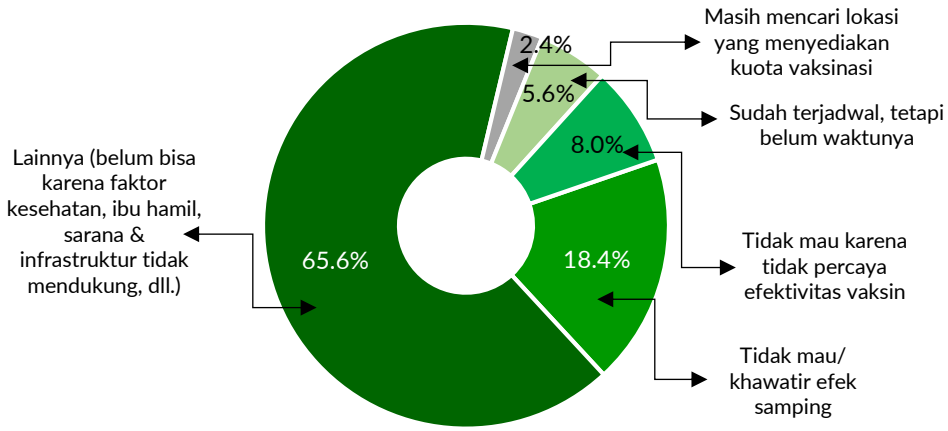

Dari sekian banyak responden yang belum mengikuti vaksinasi, alasan terbanyak adalah alasan lainnya seperti sulitnya akses ke tempat vaksin, belum bisa mendapatkan vaksin, atau sarana yang belum siap. Sementara sekitar 2,4 persen lebih menyatakan masih mencari atau masih menunggu jadwal vaksin. Menariknya ada 8,0 persen responden tidak percaya akan Vaksin Covid-19. Sementara 18,4 persen lainnya menyatakan khawatir akan efek samping yang ditimbulkan dari pemberian vaksin.

Berdasarkan hasil dari SPMPMPC-19, jumlah responden yang terpapar Covid-19 setelah mendapatkan vaksinasi ternyata jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang belum mendapatkan vaksinasi. Ini menegaskan efektivitas vaksinasi COVID-19 dalam menekan penyebaran kasus yang cukup baik.

5. KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

5.1 Mengapa Kesehatan Mental Penting

Kesehatan bukan hanya menyangkut kondisi fisik semata, melainkan juga termasuk kondisi kejiwaan seseorang. Seperti halnya kesehatan fisik, kesehatan jiwa adalah bagian integral setiap individu. Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang kesehatan fisik, melainkan juga berdampak pada kesehatan jiwa. Dalam situasi darurat kesehatan seperti saat ini, suka tidak suka seluruh masyarakat harus mengikuti dan mematuhi berbagai aturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini memiliki dampak yang multi-dimensi dan berpotensi menimbulkan tekanan bagi masyarakat.

Upaya-upaya promotif dan preventif merupakan hal penting yang bermanfaat untuk mencegah gangguan kesehatan jiwa. Keduanya bisa dilakukan melalui intervensi berbasis keluarga. Keluarga sebagai lingkungan terdekat memiliki peranan sangat penting dalam mendidik dan membentuk generasi kuat dan sehat. Keluarga dapat menjadi pendorong perubahan perilaku dalam menerapkan protokol kesehatan 3M dan juga menjaga kesehatan jiwa. Keluarga juga merupakan tempat pertama kita belajar dan berbagi informasi yang benar tentang Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung lama dapat berakibat pada kesehatan mental masyarakat. Kondisi pandemi yang mengganggu kesehatan secara fisik dan psikis juga telah mengubah pola hidup masyarakat. Efek dari hal tersebut dapat berupa kejenuhan dalam menghadapi pandemi atau dikenal dengan *pandemic fatigue*. Gangguan ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa tapi juga oleh anak-anak disebabkan hilangnya lingkungan sosial akibat kebijakan penutupan sekolah. Tekanan ekonomi imbas pandemi dapat menimbulkan efek buruk terhadap mental masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga serta tingkat kriminalitas dapat saja meningkat. Kejenuhan menghadapi pandemi dan juga gangguan kesehatan mental lainnya pada akhirnya dapat berakibat pada penurunan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan yang menjadikan sebagian masyarakat tersebut rawan terpapar Covid-19.

https://lampung.bps.go.id

5.2 Situasi Kesehatan Mental Masyarakat

Gambar 13 memberikan penjelasan seperti apa perasaan responden selama periode pelaksanaan pembatasan kegiatan. Secara umum, sebagian besar responden merasa jenuh dan sangat jenuh. Keduanya mencapai 69,9 persen. Ini artinya sekitar 7 dari 10 orang responden mengatakan mengalami kejenuhan selama berdiam diri di rumah dalam periode PPKM darurat. Di sisi lain, seperti sudah diduga sebelumnya, responden yang mengaku senang selama berdiam diri di dalam rumah dalam periode PPKM darurat sangat sedikit. Tercatat hanya 1,7 persen yang mengaku senang dan hanya 1,0 persen yang mengaku sangat senang. Sisanya, 27,56 persen menyatakan perasaannya biasa saja menyikapi aturan pemerintah yang mengharuskan mereka untuk berdiam diri di dalam rumah demi mencegah penyebaran kasus Covid-19.

Gambar 13.
Perasaan yang Dialami Saat Berdiam di Rumah di Lampung

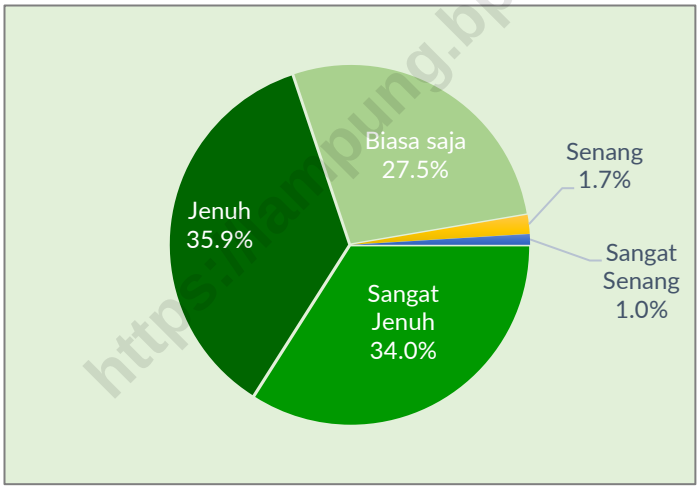

https://lampung.bps.go.id

Jika dibandingkan antara responden laki-laki dan perempuan, ternyata responden laki-laki lebih banyak yang merasa jenuh dan sangat jenuh saat berdiam di rumah. Namun responden perempuan lebih banyak mengalami kecemasan atau rasa takut pada masa pembatasan kegiatan. Hal ini terkait dengan karakter laki-laki yang cenderung lebih aktif dan ingin bebas dalam beraktivitas. Sementara, kaum perempuan lebih banyak patuh terhadap aturan yang ada. Hasil survei memperlihatkan bahwa sekitar 75,4 persen responden laki-laki merasa jenuh dan sangat jenuh ketika harus berdiam diri di rumah akibat kebijakan PPKM Darurat. Sementara itu, jumlah responden perempuan yang merasakan hal yang sama ada sebanyak 62,1 persen (Gambar 14).

Gambar 14.
Perasaan yang Dialami Saat Berdiam di Rumah Akibat Pembatasan Aktivitas Menurut Jenis Kelamin di Lampung

https://lampung.bps.go.id

Gambar 15.
Perasaan yang Dialami Saat Berdiam di Rumah Akibat Pembatasan Aktivitas Menurut Status Pernikahan di Lampung

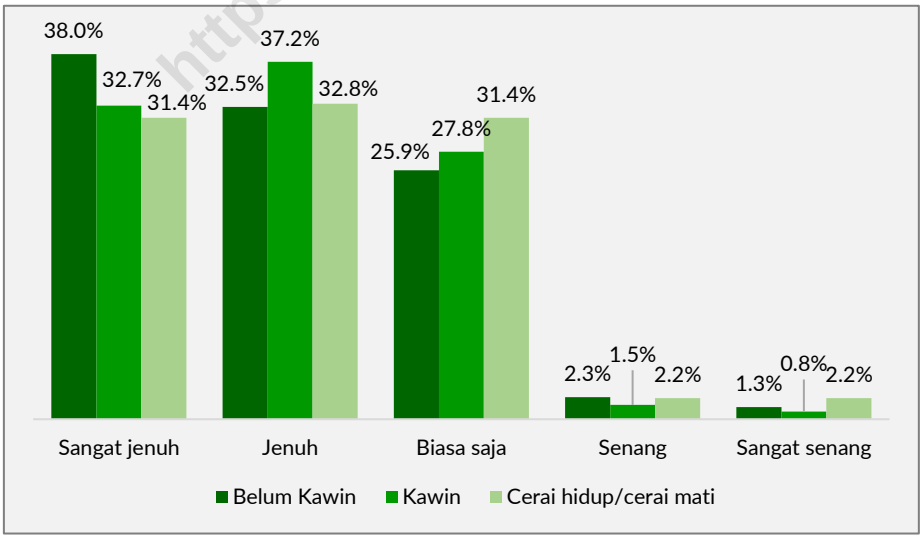

Sementara itu jika dilihat berdasarkan latar belakang status pernikahan, maka dapat terlihat bahwa responden yang masih *single* cenderung lebih merasa tertekan akibat PPKM Darurat. Mereka yang belum menikah cenderung lebih

banyak yang menjawab jenuh dan sangat jenuh ketika harus berdiam diri di dalam rumah selama PPKM, sementara responden yang sudah menikah lebih sedikit dengan perbedaan yang tidak signifikan. Faktor penyebabnya tentu saja keberadaan keluarga. Bagi responden yang sudah menikah umumnya lebih senang meluangkan waktu bersama keluarga sehingga ketika ada pembatasan kegiatan di luar rumah mereka lebih mampu mengelola tekanan. Sementara responden yang belum menikah umumnya senang beraktivitas di luar rumah sehingga ketika ada pembatasan kegiatan di luar rumah mereka merasa tertekan (Gambar 15).

Gambar 16.
Perasaan yang Dialami Saat Berdiam di Rumah Akibat Pembatasan Aktivitas Menurut Kelompok Umur di Lampung

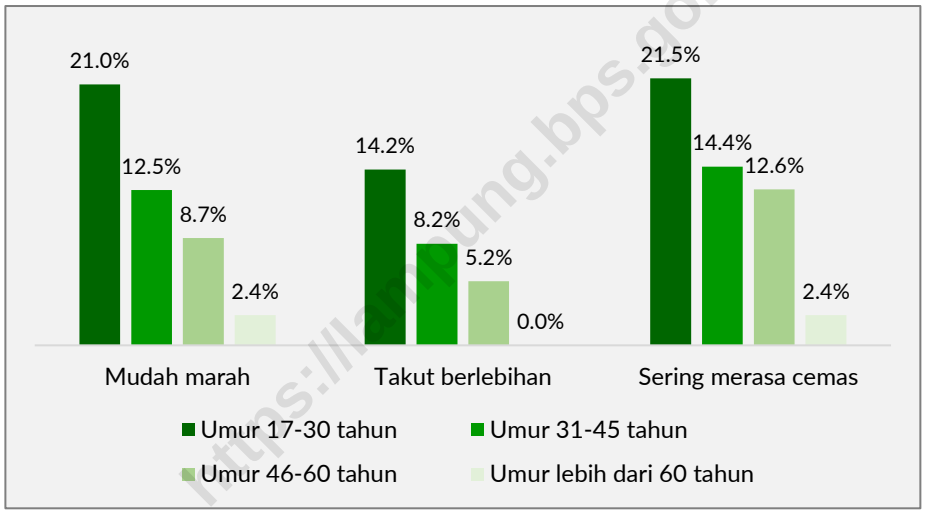

https://lampung.bps.go.id

Gambar 16 semakin mempertegas hal ini. Kaum muda yang berada pada kelompok umur 17-30 tahun memiliki kecenderungan merasa lebih mudah marah, takut berlebihan, dan sering merasa cemas akibat dari pemberlakuan pembatasan aktivitas. Sebanyak 21,0 persen responden usia 17-30 tahun mengaku menjadi sangat mudah merasa marah. Sementara 14,2 persen lainnya mengaku memiliki rasa takut yang berlebihan, sedangkan sejumlah 21,5 persen menjadi sering merasa cemas. Jumlah ini bisa dibilang merupakan jumlah yang terbesar diantara kelompok umur lainnya.

Gambar 17 memberikan gambaran beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat Lampung dalam menyingkirkan dampak buruk akibat pandemi Covid-19. Salah satu yang paling sering dilakukan responden adalah memperbanyak ibadah disusul berkomunikasi dengan keluarga. Kedua kegiatan ini merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk menangkal segala dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap kesehatan mental.

Gambar 17.
Kegiatan yang Dilakukan Selama Pembatasan Kegiatan di Lampung

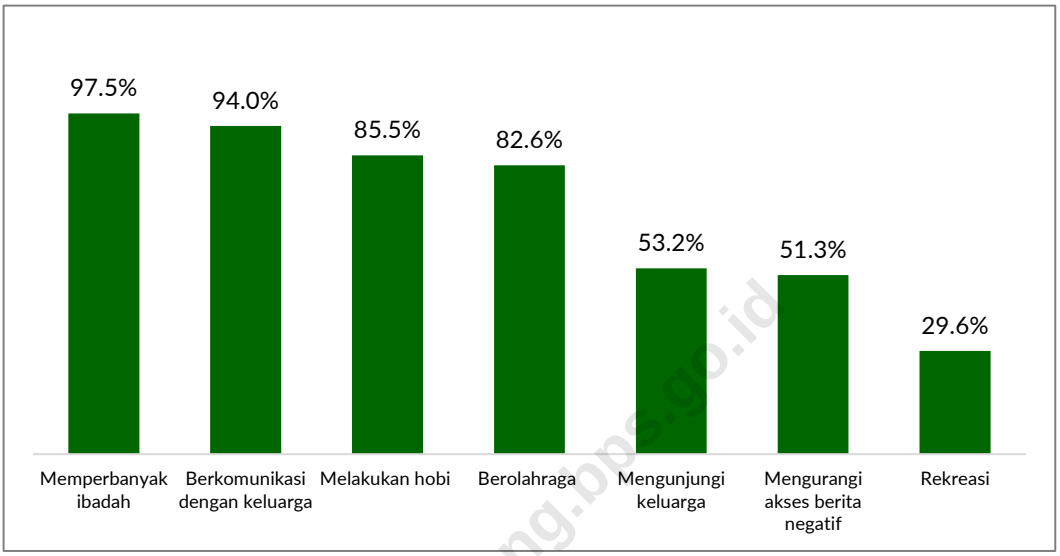

https://lampung.bps.go.id

6. KESIMPULAN

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk Lampung di dalamnya terdiri atas 3 strategi utama, yaitu: disiplin pelaksanaan protokol kesehatan 3M, penyelenggaraan 3T, dan program vaksinasi nasional. Pemerintah juga memberlakukan sejumlah kebijakan yang menyentuh langsung ke masyarakat yaitu penerapan PSBB, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM berlevel hingga penyediaan Posko Desa/Kelurahan. Strategi terbaik dalam penanganan Covid-19 adalah dengan menjadikan perilaku masyarakat melaksanakan protokol kesehatan sebagai garda terdepan, sementara penanganan Kesehatan sebagai benteng terakhir pengendalian Covid-19. Kombinasi kedua upaya di atas dengan program vaksinasi nasional menjadi strategi intervensi yang saling mendukung dan tidak terpisahkan satu sama lain.

Berdasarkan hasil Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19 dan juga dibandingkan dengan survei perilaku sebelumnya (Bulan April dan September 2020), kepatuhan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan selalu yang paling sulit dilakukan di antara semua kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Selain itu, jika dibandingkan antara responden yang pernah terpapar Covid-19 dengan responden yang belum pernah terpapar, maka tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan responden yang belum pernah terpapar cenderung lebih rendah. Jika dikaitkan dengan kasus harian, ditemukan adanya korelasi yang berkebalikan antara tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan dengan penambahan kasus harian. Hasil survei membuktikan bahwa semakin tinggi kepatuhan protokol kesehatan maka semakin rendah peningkatan kasus hariannya. Hal ini menegaskan bahwa

kepatuhan terhadap protokol Kesehatan merupakan Langkah yang sangat efektif dalam menekan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil survei, kesadaran responden di Lampung untuk melakukan pelaporan ketika terpapar Covid-19 terbilang masih belum optimal. Dalam penerapan strategi penanganan Covid-19, pemerintah menginstruksikan untuk dibentuknya Posko Desa/Kelurahan atau unit terkecil dalam lingkungan setempat. Namun, hasil survei memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat akan Posko desa/kelurahan sebagai unit terdepan penanganan Covid-19 masih rendah. Sementara, jika peran dan fungsi Posko Desa/Kelurahan dapat berjalan dengan optimal, maka kasus penyebaran Covid-19 dapat ditekan dari unit lingkungan terkecil.

Jumlah responden yang terpapar Covid-19 setelah mendapatkan vaksinasi ternyata jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang belum mendapatkan vaksinasi. Ini menegaskan efektivitas vaksinasi Covid-19 dalam menekan penyebaran kasus yang cukup baik. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi. Selain itu, pandemi Covid-19 yang berlangsung lama dapat berakibat pada kesehatan mental masyarakat. Kondisi pandemi yang mengganggu kesehatan juga telah mengubah pola dan cara hidup masyarakat, bisa saja tidak dapat diterima secara baik oleh sebagian kalangan masyarakat.

Efek dari hal tersebut dapat berupa kejenuhan dalam menghadapi pandemi atau dikenal dengan *pandemic fatigue* serta berbagai gangguan kesehatan mental lainnya. Kejenuhan menghadapi pandemi dan juga gangguan kesehatan mental lainnya pada akhirnya dapat berakibat pada penurunan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan yang menjadikan sebagian masyarakat tersebut rawan terpapar Covid-19.

https://lampung.bps.go.id

7. REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020.* Berita Resmi Statistik. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).* Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. https://covid19.go.id/p/protokol/protokol- percepatan-penanganan-pandemi-covid-19-corona-virus-disease-2019

McArthur, J. A. (2020). *Why social distancing is so difficult; how research explains our behavior.* Newswise.Com. https://www.newswise.com/coronavirus/why-social- distancing-is-so-difficult-how-research-explains-our-behavior

Novi Afrianti, C. R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19. *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 11(1), 113– 124.

Pradono, J., & Sulistyowati, N. (2014). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Tentang Kesehatan Lingkungan, Perilaku Hidup Sehat

Dengan Status Kesehatan (Studi Korelasi Pada Penduduk Umur 10-24 Tahun di Jakarta Pusat). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, *17*(1), 89–95. https://www.neliti. com/publications/20885/correlation-between-education-level-knowledge-of- environmental-health-healthy-be

Rajan, S., D. Cylus, J., & Mckee, M. (2020). What do countries need to do to implement effective 'find, test, trace, isolate and support' systems? *Journal of the Royal Society of Medicine*, 113(7), 245–250. https://doi.org/10.1177/0141076820939395

REUTERS. (2021). *Russia reports cases of more contagious COVID-19 Delta subvariant* | Reuters. EUROPE. https://www.reuters.com/world/europe/russia-reports- cases-more-contagious-covid-19-variant-reports-2021-10-21/

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020a). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 - Regulasi*, Covid19.go.id. https://covid19.go.id/p/regulasi/ keppres-nomor-7-tahun-2020-tentang-gugus-tugas-percepatan- penanganan-covid-i9

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020b). *Pedoman Perubahan Perilaku. In Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19*. Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). *Pengendalian COVID-19 Dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten Buku 2 - Masyarakat Umum*| Covid19.go.id. Satuan Tugas Penanganan COVID-19. https://covid19. go.id/edukasi/masyarakat-umum/pengendalian-covid-19-dengan-3m-3t- vaksinasi-disiplin-kompak-dan-konsisten-buku-2

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). *Protokol Tatalaksana COVID-19 di Indonesia - Protokol*, Covid19.go.id. Protokol. https://covid19.go.id/p/ protokol/protokol-tatalaksana-covid-19-di-indonesia

WHO. (2020). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. https://www.who.int/director-general/speeches/ detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on- covid-19 11-march-2020

WHO. (2021). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard* .WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data. https://covid19.who.int/

Wiranti, Sriatmi, A., & Kusumastuti, W. (2020). Determinan kepatuhan masyarakat Kota Depok terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam pencegahan COVID-19. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 09(03), 117–124. https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/58484

Zhang, J. jin, Dong, X., Cao, Y. yuan, Yuan, Y. dong, Yang, Y. bin, Yan, Y. qin, Akdis, C. A., & Gao, Y. dong. (2020). Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China. Allergy: *European Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 75(7), 1730–1741. https://doi.org/10.1111/ALL.14238

https://lampung.bps.go.id

https://lampung.bps.go.id

KARAKTERISTIK PENDUDUK LAMPUNG YANG SEMENTARA TIDAK BEKERJA DAN MENGANGGUR KARENA COVID-19

https://lampung.bps.go.id

1. PANDEMI COVID-19 DAN KETENAGAKERJAAN DI LAMPUNG

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di berbagai belahan dunia. Di Indonesia ada 4 kategori penduduk yang terdampak COVID-19 dari sudut pandang ketenagakerjaan, yaitu pengangguran karena COVID-19; Bukan Angkatan Kerja (BAK) atau mereka yang memilih aktivitas lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak mencari pekerjaan karena pandemi COVID-19; penduduk yang sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Penduduk yang sementara berhenti bekerja dan yang mengalami pengurangan jam kerja merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang pada Agustus tahun 2021 masih bekerja, sedangkan penganggur dan mereka yang berubah status menjadi BAK merupakan penduduk yang terdampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan mereka berhenti bekerja.

Berdasarkan data Sakernas tahun 2021, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 lebih dari 440 ribu orang. Dampak yang paling banyak terjadi adalah pengurangan jam kerja. Jumlah penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 ada sebanyak 351,5 ribu orang. Penduduk yang sementara tidak bekerja dan menganggur ada sebanyak 73,3 ribu orang.

https://lampung.bps.go.id

Gambar 18.
Jumlah Penduduk 15 Tahun atau Lebih yang Terdampak COVID-19
(Juta Orang), Agustus 2021

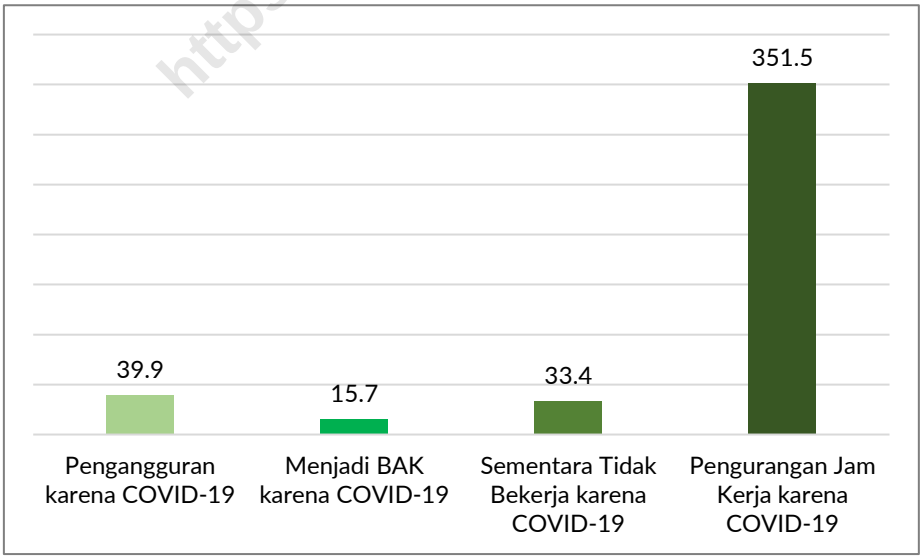

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021

Karakteristik pekerja yang terdampak COVID-19 tidaklah sama. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki yang terdampak COVID-19 (25,8 ribu orang) lebih besar daripada perempuan (14,0 ribu orang). Menurut beberapa referensi, tenaga kerja perempuan lebih terdampak dibandingkan pekerja laki-laki. Kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan lebih banyak dialami perempuan (ILO & OECD, 2020).

Gambar 19.
Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih yang Terdampak COVID-19
Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2021

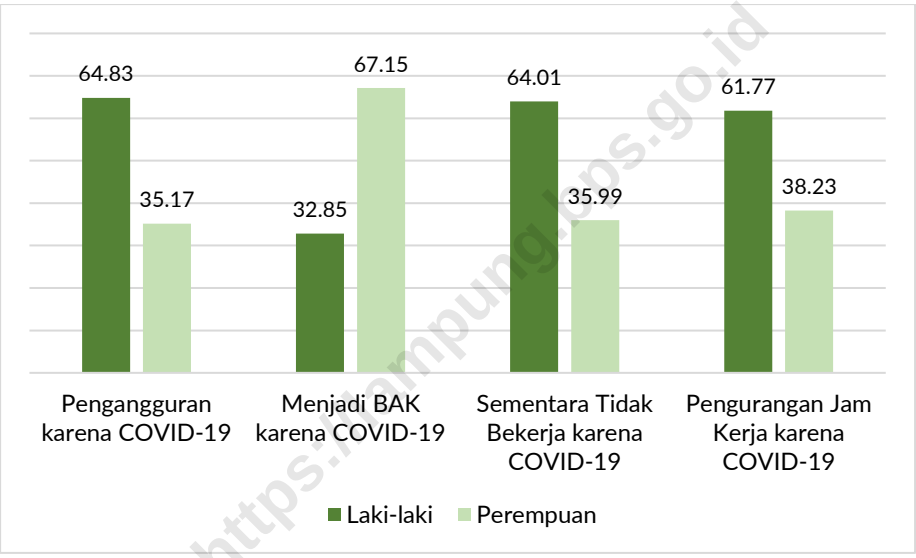

https://lampung.bps.go.id

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021

Pada pembahasan berikutnya akan dianalisis berbagai faktor yang diduga memengaruhi seseorang berhenti bekerja atau sementara tidak bekerja. Kajian ini difokuskan pada mereka yang berhenti bekerja dan menganggur karena COVID-19, sedangkan pekerja yang mengalami perubahan status bukan angkatan kerja (BAK) dan pengurangan jam kerja tidak dianalisis lebih lanjut. Hal ini karena pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja masih mendapatkan pekerjaan dan pendapatan, namun mereka yang menganggur dan sementara tidak bekerja berpotensi untuk tidak memperoleh penghasilan.

2. KETERKAITAN KARAKTERISTIK PEKERJA DAN KONDISI SEMENTARA TIDAK BEKERJA ATAU MENGANGGUR KARENA COVID-19

Studi yang dilakukan lembaga internasional tentang kondisi ketenagakerjaan pada masa pandemi COVID-19 mengungkapkan beberapa temuan yang patut menjadi perhatian. Kehilangan pekerjaan dan penurunan

pendapatan lebih banyak dialami perempuan. Hal ini disebabkan karena ketika terdapat pemberlakuan pembatasan kegiatan pada awal pandemi, perempuan memiliki pekerjaan domestik yang menyita waktu disamping pekerjaan mereka yang rentan (ILO & OECD, 2020a). Berdasarkan perbandingan dampak COVID-19 dan Global Financial Crisis (GFC) tahun 2007-2008 di 9 negara (Meksiko, Turki, Itali, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Korea, dan Jepang), perempuan lebih banyak terdampak dalam penurunan jam kerja dibandingkan laki-laki dan kondisi ini lebih dalam lagi pada saat pandemi COVID-19 terjadi (ILO & OECD, 2020b).

Selanjutnya, karakteristik pekerja yang terdampak COVID-19 juga dapat dilihat dari keahlian/skill yang diindikasikan dari pendidikan dan pelatihan yang pernah dijalani. Pekerja dengan upah rendah dan dengan keahlian rendah banyak mengalami penurunan upah/pendapatan dan kehilangan pekerjaan (ILO & OECD, 2020a). Di sejumlah negara, banyaknya pekerja dengan upah rendah yang berhenti bekerja adalah dua kali lipat dari mereka yang dirumahkan sementara (temporary unemployed) (Foucault & Galasso, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja turut serta memengaruhi kemungkinan seorang pekerja diberhentikan dari pekerjaannya.

Dari sisi usia, pekerja yang termasuk dalam kelompok usia muda lebih banyak terkena PHK karena sebagian besar pekerja berada pada kelompok ini dan untuk meminimalisasi dampak kerugian karena pandemi COVID-19, perusahaan cenderung mempertahankan pekerja dengan golongan usia yang lebih tua dan berpengalaman (Ngadi, dkk., 2020). Di negara G20, pengangguran usia muda mengalami kenaikan lebih tinggi dari usia yang lebih tua. Pada Juli 2020 pengangguran usia muda di banyak negara G20 mencapai angka tertinggi. Hal ini disebabkan karena mayoritas pekerja muda bekerja secara informal dan bekerja pada sektor yang terdampak (ILO & OECD, 2020a).

Di Indonesia, dampak pandemi terhadap aktivitas ekonomi terutama mengena melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan. Selama tahun 2020 sektor transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, perdagangan, konstruksi, industri pengolahan mengalami kontraksi di atas 5 persen. Hal ini berpengaruh besar terhadap ketenagakerjaan pada sektor tersebut baik secara langsung atau tidak langsung.

Selain dari sisi sektor lapangan usaha, hal lain yang menjadi pembeda peluang pekerja menjadi pengangguran adalah status pekerjaan. Pekerja informal lebih rentan menjadi pengangguran dan mengalami penurunan pendapatan. Terdapat dua alasan, pertama pekerja informal banyak yang bergerak pada sektor yang terdampak. Kedua, usaha informal umumnya berskala kecil dan rentan terhadap goncangan (ILO & OECD, 2020a). Di negara G20, 70 persen pekerja informal terdampak dan 61 persen mengalami penurunan pendapatan (ILO, 2020 dikutip dari ILO & OECD, 2020). Namun di sisi lain, pekerjaan informal bersifat fleksibel sehingga mudah untuk berganti pekerjaan (Pitoyo, 2007).

Dari uraian di atas, dapat disarikan beberapa karakteristik penduduk yang bekerja dan berhenti bekerja karena COVID-19. Hipotesis sementara dari uraian di atas diantaranya adalah:

1. Pekerja di perkotaan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjadi pengangguran atau berhenti sementara karena COVID-19 dibandingkan pekerja di perdesaan.
2. Pekerja perempuan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjadi pengangguran atau berhenti sementara karena COVID-19 dibandingkan pekerja laki-laki.
3. Pekerja usia muda memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjadi pengangguran atau berhenti sementara karena COVID-19 dibandingkan pekerja dewasa.
4. Pekerja dengan pendidikan rendah memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjadi pengangguran atau berhenti sementara karena COVID-19 dibandingkan pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi.
5. Pekerja di sektor jasa dan industri memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjadi pengangguran atau berhenti sementara karena COVID-19 dibandingkan pekerja di pertanian.
6. Pekerja informal memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjadi pengangguran atau berhenti sementara karena COVID-19 dibandingkan pekerja formal.

Selain uraian hipotesis di atas, kajian ini juga menambahkan status dalam rumah tangga dan status perkawinan sebagai faktor determinan pengangguran dan berhenti bekerja sementara. Pihak pemberi kerja (pengusaha) diasumsikan akan lebih cenderung memberhentikan pekerja yang tidak memiliki tanggungan keluarga dibandingkan pekerja yang menikah dan menjadi kepala rumah tangga. Sehingga, kajian ini juga akan menguji apakah faktor status perkawinan dan status dalam rumah tangga turut memengaruhi seseorang menjadi pengangguran atau berhenti bekerja karena Pandemi COVID-19.

Hipotesis dalam penelitian kajian ini selanjutnya akan diuji secara statistik menggunakan indikator *odds ratio* dan analisis regresi logistik. Data yang digunakan bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2021 yang dihasilkan oleh BPS.

www.lampung.bps.go.id

2.1 Karakteristik Pekerja yang Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19 di Provinsi Lampung

Sementara tidak bekerja adalah keadaan seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Pekerja yang sementara tidak bekerja karena COVID-19 adalah pekerja yang sementara tidak bekerja karena terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau mengalami karantina mandiri. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021 pekerja dengan kategori tersebut berjumlah 33,4 ribu orang.

Apabila dilihat menurut berbagai kategori, persentase tenaga kerja yang sementara tidak bekerja karena terdampak COVID-19 dibandingkan mereka yang sementara tidak bekerja bukan karena COVID-19 lebih banyak di perkotaan, berusia muda (15-24 tahun), berstatus non-KRT, belum kawin, dan bekerja dan di sektor nonpertanian. Kondisi ini secara umum sesuai dengan hipotesis yang diuraikan sebelumnya.

Hal yang menarik dari kajian ini adalah tenaga kerja yang berjenis kelamin laki-laki, usia dewasa, berpendidikan perguruan tinggi justru lebih banyak terdampak menjadi sementara tidak bekerja akibat COVID-19 sehingga tidak sesuai hipotesis yang disebutkan sebelumnya.

Tabel 1.
Persentase Karakteristik Tenaga Kerja yang Sementara Tidak Bekerja karena COVID-19 di Provinsi Lampung

Faktor	Kategori	Persentase
(1)	(2)	(3)
Wilayah Tempat Tinggal	Perkotaan	51,85
	Perdesaan	48,15
Jenis Kelamin	Laki-laki	64,01
	Perempuan	35,99
Usia	15-24 (Muda)	12,16
	25+ (Dewasa)	87,84
Status Hubungan dalam Rumah Tangga	KRT	57,78
	Non KRT	42,22
Status Perkawinan	Belum kawin	11,58
	Pernah kawin	88,42
Tingkat Pendidikan	SMA ke bawah	88,31
	Perguruan Tinggi	11,69
Lapangan Usaha	Pertanian	11,25
	Non pertanian	88,75
Status Pekerjaan	Formal	48,02
	Informal	51,98

Sumber: diolah dari Sakernas Agustus 2021

https://lampung.bps.go.id

Untuk melihat signifikansi dan peluang masing-masing kelompok tenaga kerja yang sementara tidak bekerja, dilakukan analisis regresi logistik biner yang sesuai dengan jenis variabel dependen yang digunakan.

2.2 Tenaga Kerja yang Sementara Tidak Bekerja Akibat COVID-19 di Provinsi Lampung

Metode analisis regresi logistik biner digunakan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi tenaga kera yang sementara tidak bekerja akibat COVID-19. Berdasarkan persamaan model analisis regresi logistik biner yang terbentuk, terdapat 8 variabel yang masuk ke dalam model, dimana 7

diantaranya merupakan variabel independen. Model yang dihasilkan dari pengujian adalah sebagai berikut:

$$Ln\ (p/1-p) = -0{,}687 + 0{,}679X_1 + 0{,}658X_2 + 0{,}867X_3 - 0{,}540X_4 - 0{,}572X_5 - 1{,}873X_6 + 0{,}316X_7$$

Keterangan:
p : Peluang tenaga kerja yang sementara tidak bekerja akibat COVID-19
X_1 : Wilayah tempat tinggal
X_2 : Jenis kelamin
X_3 : Usia
X_4 : Status hubungan dalam rumah tangga
X_5 : Status perkawinan
X_6 : Status pekerjaan
X_7 : Lapangan usaha

Tabel 2.
Statistik Uji Model Regresi Logistik Tenaga Kerja yang Sementara Tidak Bekerja Akibat COVID-19 di Provinsi Lampung

Faktor	B	Standard Error	Statistik Uji Wald	Derajat Bebas	Signifi-kansi	Exp(B) (*odds ratio*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konstanta	-0,687	0,027	654,291	1	0,000	0,503
Wilayah tempat tinggal (X_1)	0,679	0,016	1854,556	1	0,000	1,971
Jenis kelamin (X_2)	0,658	0,022	917,911	1	0,000	1,931
Kelompok umur (X_3)	0,867	0,031	797,160	1	0,000	2,380
Hubungan dengan KRT (X_4)	-0,540	0,022	587,337	1	0,000	0,583
Status perkawinan (X_5)	-0,572	0,031	331,802	1	0,000	0,564
Lapangan usaha (X_6)	-1,873	0,021	7828,632	1	0,000	0,154
Status pekerjaan (X_7)	0,316	0,016	371,107	1	0,000	1,372

Sumber: diolah dari Sakernas Agustus 2021

https://lampung.bps.go.id

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel yang digunakan dalam model signifikan terhadap kejadian sementara tidak bekerja karena terdampak COVID-19. Pada regresi logistik biner, yang diinterpretasi adalah nilai dari *odds ratio* untuk masing-masing variabel bebas yang menunjukkan kecenderungan untuk sementara tidak bekerja karena terdampak COVID-19.

Dilihat dari sisi tempat tinggal, pekerja yang tinggal di perkotaan memiliki kecenderungan sebesar 1,971 kali untuk sementara tidak bekerja karena terdampak COVID-19 dibanding mereka yang tinggal di perdesaan. Hal ini mudah dipahami mengingat PSBB dan kebijakan lain yang berkaitan dengan aturan pembatasan aktivitas masyarakat memang lebih banyak diimplementasikan di perkotaan.

Sementara itu, variabel jenis kelamin (X2) menghasilkan koefisien positif dan nilai odds ratio sebesar 1,931 (exp 0,658). Tenaga kerja laki-laki memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk sementara tidak bekerja karena terdampak COVID-19 sebesar 1,931 kali dibandingkan dengan pekerja perempuan.

Jika melihat dari karakteristik umur, variable umur memiliki nilai odd rasio yang paling tinggi yaitu sebesar 2,380 (exp 0,867) artinya pekerja muda (usia 15-24 tahun) memiliki kecenderungan 2,380 kali untuk sementara tidak bekerja karena terdampak COVID-19 dibandingkan dengan pekerja dewasa (usia 25+ tahun).

Penduduk yang merupakan kepala rumah tangga memiliki kecenderungan lebih kecil untuk sementara tidak bekerja karena terdampak COVID-19. Hal ini dapat terlihat dari nilai odd rasio yang kurang dari 1 yaitu sebesar 0,583 (-0,540). Kepala rumah tangga memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehingga dimungkinkan ketika mereka ada perubahan pekerjaan lain ketika mereka sementara tidak bekerja disatu pekerjaan.

Variabel status perkawinan juga signifikan terhadap peluang untuk sementara tidak bekerja akibat COVID-19 dengan koefisien negatif dan nilai odds ratio sebesar 0,564 (exp -0,572). Artinya, orang yang belum kawin memiliki peluang untuk sementara tidak bekerja karena terdampak COVID-19 lebih kecil dibanding mereka yang berstatus pernah kawin. Hal ini sesuai dengan asumsi awal bahwa pihak pemberi kerja (pengusaha) lebih cenderung akan memberhentikan pekerja yang tidak memiliki tanggungan keluarga dibandingkan pekerja yang menikah/pernah menikah.

Variabel dengan odds ratio terkecil adalah lapangan usaha yaitu 0,154 (exp -1,873). Artinya, seseorang yang bekerja di bidang nonpertanian memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk sementara tidak bekerja dibandingkan yang bekerja di bidang pertanian. Hal ini sejalan dengan data BPS (2020b) yang menunjukan bahwa peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal masa pandemi masih cukup baik.

Dilihat dari status pekerjaan, pekerja formal memiliki kecenderungan lebih besar untuk sementara tidak bekerja akibat COVID-19 yaitu sebesar 1,372 kali dibandingkan dengan pekerja sektor informal.

2.3 Karakteristik Pengangguran Karena COVID-19 di Povinsi Lampung

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (BPS, 2021b). Penduduk yang menganggur karena COVID-19 adalah mereka yang berhenti bekerja karena berbagai alasan seperti: ttakut terinfeksi virus, adanya aturan pembatasan kegiatan, dan karantina mandiri, atau berhenti bekerja karena terkena PHK, usaha terhenti/bangkrut, pendapatan kurang memuaskan, tidak cocok dengan lingkungan kerja, habis masa kerja/kontrak, atau diharuskan mengurus rumah tangga.

Hasil Sakernas Agustus 2021 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran karena COVID-19 sebanyak 39,9 ribu orang. Hasil Sakernas juga menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang menganggur melebihi jumlah tenaga kerja yang sementara tidak bekerja karena COVID-19.

Apabila dilihat menurut berbagai kategori, pengangguran karena terdampak COVID-19 di Provinsi Lampung lebih banyak terjadi pada pengangguran yang tinggal di perkotaan, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bukan kepala rumah tangga, berstatus belum kawin, dan berpendidikan minimal SMA ke bawah.

https://lampung.bps.go.id

Tabel 3.
Persentase Karakteristik Pengangguran karena COVID-19 di Provinsi Lampung

Faktor	Kategori	Persentase
(1)	(2)	(3)
Wilayah Tempat Tinggal	Perkotaan	56,90
	Perdesaan	43,10
Jenis Kelamin	Laki-laki	64,83
	Perempuan	35,17
Usia	15-24 (Muda)	42,78
	25+ (Dewasa)	57,22
Status Hubungan dalam Rumah Tangga	KRT	27,42
	non KRT	72,58
Status Perkawinan	Belum kawin	54,54
	Pernah kawin	45,46
Tingkat Pendidikan	SMA ke bawah	87,03
	Perguruan Tinggi	12,97

Sumber: diolah dari Sakernas Agustus 2021

Selanjutnya, untuk melihat tingkat signifikansi dan pengaruh faktor sosial demografi pengangguran akibat COVID-19, dilakukan analisis regresi logistik biner yang sesuai dengan variabel dependen yang digunakan.

2.4 Gambaran Karakteristik Pengangguran Karena COVID-19 di Provinsi Lampung

Berdasarkan persamaan model yang terbentuk, terdapat 6 variabel yang masuk ke dalam model, dimana 5 diantaranya merupakan variabel independen. Adapun persamaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Ln\ (q/1-q) = -1{,}286 + 0{,}162X_1 - 0{,}061X_2 + 0{,}178X_3 + 1{,}851X_4 - 0{,}653X_5$$

Keterangan:
q : Peluang pengangguran karena terdampak COVID-19
X_1 : Wilayah tempat tinggal
X_2 : Jenis kelamin
X_3 : Usia
X_4 : Status hubungan dalam rumah tangga
X_5 : Tingkat Pendidikan

Variabel pertama yaitu wilayah tempat tinggal dengan koefisien positif dan *odds ratio* sebesar 1,176 (exp 0,162). Orang yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki peluang untuk menganggur akibat COVID-19 lebih tinggi (1,2 kali) dibandingkan orang yang tinggal di perdesaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal yaitu pekerja di perkotaan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menganggur akibat COVID-19 dibandingkan pekerja di perdesaan. Selain itu, juga diperkuat dengan data hasil Sakernas Agustus 2021 bahwa persentase pengangguran karena terdampak COVID-19 lebih banyak di wilayah perkotaan.

Variabel berikutnya adalah jenis kelamin (X2) dengan koefisien negatif dan odds ratio sebesar 0,941 (exp -0,061). Pekerja laki-laki memiliki peluang untuk menjadi pengangguran karena COVID-19 lebih rendah dibandingkan perempuan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa perempuan merupakan kelompok yang lebih rentan untuk menganggur.

Variabel usia juga memengaruhi pengangguran akibat COVID-19, dengan odds ratio sebesar 1,194 (exp 0,178). Maknanya orang yang berusia 15-24 (muda) memiliki kecenderungan sebesar 1,2 kali dibandingkan usia 25+ tahun (dewasa) untuk menjadi pengangguran karena COVID-19. Kondisi ini dapat mengindikasikan pengusaha lebih memilih untuk memberhentikan pekerja yang berusia muda dan lebih memilih yang berusia dewasa karena umumnya dapat pekerja dewasa memiliki pengalaman lebih banyak dibanding dengan pekerja usia muda.

Status sebagai kepala rumah tangga juga memengaruhi pengangguran akibat COVID-19, dengan odds ratio 6,369 (exp 1,851). Artinya, orang yang sebagai KRT memiliki peluang lebih besar (6,4 kali) untuk menjadi pengangguran karena COVID-19 dibandingkan yang bukan KRT.

www.lampung.bps.go.id

Tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, dengan odds ratio sebesar 0,521 (exp -0,653). Orang yang berpendidikan SMA ke bawah memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk menjadi pengangguran karena COVID-19 dibanding yang sudah tamat perguruan tinggi. Hal ini bertentangan dengan hipotesis awal bahwa pendidikan rendah memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjadi pengangguran karena COVID-19 dibandingkan pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja seseorang dalam bekerja. Namun seseorang yang memiliki Pendidikan yang rendah cenderung menerima pekerjaan apapun yang ada, sedangkan seseorang dengan yang tinggi lebih selektif dalam memilih pekerjaan dan menyebabkan menganggur.

Tabel 4.
Statistik Uji Model Regresi Logistik Pengangguran Karena COVID-19 di Provinsi Lampung

Faktor	B	Standard Error	Statistik Uji Wald	Derajat Bebas	Signifi-kansi	Exp(B) (*odds ratio*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konstanta	-1,286	0,021	3581,665	1	0,000	0,276
Wilayah tempat tinggal (X1)	0,162	0,012	184,259	1	0,000	1,176
Jenis kelamin (X2)	-0,061	0,014	19,057	1	0,000	0,941
Kelompok umur (X3)	0,178	0,016	127,841	1	0,000	1,194
Hubungan dengan KRT (X4)	1,851	0,020	8839,543	1	0,000	6,369
Pendidikan (X5)	-0,653	0,019	1201,066	1	0,000	0,521

Sumber: diolah dari Sakernas Agustus 2021

https://lampung.bps.go.id

3. KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 menyebabkan sekitar 33,4 ribu orang pekerja berhenti sementara dan 39,9 ribu orang menjadi pengangguran pada bulan Agustus 2021. Beberapa variabel secara signifikan membedakan tenaga kerja yang sementara berhenti bekerja akibat COVID-19 dan sementara tidak bekerja bukan karena COVID-19, serta membedakan pengangguran karena COVID-19 dan pengangguran bukan karena COVID-19. Variabel tersebut adalah wilayah tempat tinggal, jenis kelamin, usia, status hubungan dengan kepala rumah tangga, status perkawinan, tingkat pendidikan, lapangan usaha, dan status pekerjaan.

Secara umum pekerja yang tinggal di wilayah perkotaan lebih berpeluang untuk menjadi sementara tidak bekerja dan pengangguran dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan. Jika dilihat dari jenis kelamin, pekerja laki-laki lebih berpeluang untuk sementara tidak bekerja dibandingkan perempuan, namun perempuan lebih cenderung menjadi pengangguran akibat COVID-19 dibandingkan laki-laki. Berkaitan dengan usia, penduduk muda lebih berpeluang untuk sementara tidak bekerja dan menjadi pengangguran akibat COVID-19 dibandingkan dengan penduduk usia dewasa. Kepala rumah tangga lebih berpeluang untuk menjadi pengangguran karena COVID-19 dibandingkan dengan bukan kepala rumah tangga. Pekerja yang berstatus belum kawin berpeluang lebih rendah untuk sementara tidak bekerja dibandingkan dengan mereka yang berstatus pernah kawin. Dilihat dari lapangan usaha pertanian dan status pekerjaan, pekerja di lapangan usaha non pertanian dan pekerja formal lebih berpeluang untuk sementara tidak bekerja akibat COVID-19.

4. REFERENSI

BPS. (2021a, Februari 5). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/ Th. XXIV, 5 Februari 2021

BPS. (2021b). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021. Jakarta: BPS BPS. (2020a, November 5). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020. Berita Resmi Statistik No.86/11/Th. XXIII.

BPS. (2020b, November 5). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 No. 85/11/Th. XXIII, 5 November 2020

BPS. (2020c). Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2020. Jakarta: BPS

BPS. (2020d). Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 Hasil Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 (7-14 September 2020). Jakarta: BPS

BPS. (2020d). Analisis Isu Terkini 2021. Jakarta: BPS

Foucault, M., & Galasso, V. (2020). Working after COVID-19: Cross-Country Evidence from Real-Time Survey. Diakses pada Agustus 10, 2021, from https://www. sciencespo.fr/cevipof /attitudesoncovid19/wpILO & OECD. (2020).

The impact of the COVID-19 pandemic on jobs and incomes in G20 economies. Saudi Arabia's G20 Presidency 2020 . ILO & OECD. (2020b).

Women at Work in G20 countries: Progress and policy action since 2019. G20 Saudi Arabia.

Ngadi, N., Meilianna, R., & Purba, Y. A. (2020, Juli). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PHK DAN PENDAPATAN PEKERJA DI INDONESIA. Jurnal Kependudukan Indonesia ,Juli(Demografi dan COVID-19), 43-48.

Pitoyo, A. J. (2007). Dinamika Sektor Informal di Indonesia. Jurnal Populasi,18 (2), 129–146.

https://lampung.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://lampung.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG
Jl. Basuki Rahmat No. 54 Telukbetung, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 482909 Faks. (0721) 474329
Email: bps1800@bps.go.id, Situs: www.lampung.bps.go.id